

SKRIPSI

PENGARUH EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KUALITAS HASIL KERJA AUDITOR PEMERINTAH (BPKP) TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA BOS DI SMP KOTA PEKANBARU



Oleh:

ANNESA ADRIYANI
10773000008

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2011

ABSTRAK

PENGARUH EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KUALITAS HASIL KERJA AUDITOR PEMERINTAH TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA BOS DI SMP KOTA PEKANBARU

Oleh: Annesa Adriyani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektifitas, efisiensi dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan non-probability random sampling (purposive sampling methode). Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah SMP kota Pekanbaru. Dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 51 kepala sekolah SMP kota Pekanbaru.

Pengujian hipotesis dalam pengujian ini menggunakan regresi linear berganda. Setelah diuji dengan menggunakan SPSS versi 16.0, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketiga variabel independen (efektifitas, efisiensi dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP)) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru. Sedangkan secara parsial masing-masing variabel independen yakni efektifitas auditor pemerintah (BPKP) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru sedangkan efisiensi dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang dimiliki oleh variabel yang diamati adalah sebesar $R^2 = 0.171$ yang berarti variabel-variabel independen dalam penelitian ini kurang mampu menggambarkan penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru sebesar 17,1% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar amatan.

Kata kunci: Efektifitas, efisiensi, kualitas hasil kerja auditor pemerintah serta penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Grafik	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Pengertian Pengaruh.....	9
B. Pengertian Audit.....	9
C. Pengertian Auditor	10
D. Ruang Lingkup Audit Secara Umum.....	10
E. Auditor Pemerintah	14
F. BPKP Sebagai Internal Auditor Pemerintah.....	15
G. Efektifitas.....	19
H. Efisiensi.....	19
I. Kualitas Hasil Kerja	20
J. Pengaruh Efektifitas, Efisiensi Dan Kualitas Hasil Kerja Auditor Pemerintah (BPKP) Terhadap Penyelenggaraan Dana BOS Di SMP Kota Pekanbaru	22
K. Pengertian Dana BOS	22
L. Pengawasan, Pemeriksaan Dan Sanksi	24

M. Ketentuan Yang Harus Diikuti Sekolah Penerimaan BOS	29
N. Pengujian Data	31
O. Kerangka Konseptual	31
P. Model Hipotesis	33
Q. Rumusan Hipotesis	33
R. Pandangan Islam Terhadap Audit	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Jenis Dan Sumber Data	36
C. Populasi Dan Sampel Penelitian	37
D. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	38
E. Pengembangan Instrumen	40
F. Metode Pengumpulan Data	40
G. Uji Kualitas Data	41
1. Uji Validitas	41
2. Uji Reliabilitas	42
H. Uji Normalitas Data	42
I. Uji Asumsi Klasik	43
1. Uji Multikolinieritas	43
2. Uji Autokorelasi	44
3. Uji Heteroskedastisitas	44
J. Uji Hipotesis	45
1. Uji Parsial (Uji t)	46
2. Uji Simultan (Uji F)	46
3. Koefisien Determinasi (R^2)	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pre Test	49
A.1 Uji Validitas	50
A.2 Uji Reliabilitas	54
A.3 Uji Normalitas	55

B. Pengembalian Kuesioner dan Demografi Responden	56
C. Analisis Data.....	58
1. Uji Kualitas Data	58
a. Uji Validitas	59
b. Uji Reliabilitas	63
2. Uji Normalitas.....	64
3. Uji Asumsi Klasik.....	66
a. Uji Multikolinearitas	66
b. Uji Autokorelasi.....	66
c. Uji Heteroskedastisitas.....	68
D. Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan.....	69
1. Pengujian Variabel Secara Parsial (Uji t)	72
2. Pengujian Variabel Secara Simultan (Uji F).....	75
3. Koefisien Determinasi	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	78
B. Keterbatasan	79
C. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan ujung tombak suatu negara, tertinggal atau majunya suatu negara dilihat dari mutu suatu pendidikan dan kondisi pendidikannya, karena melalui pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga antara pendidikan yang bermutu dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki negara merupakan dua aspek penting yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Negara menggambarkan alokasi dana disektor pendidikan, oleh sebab itu masalah keuangan dilembaga pendidikan terutama di sekolah diyakini memberikan dampak yang langsung berpengaruh terhadap kualitas sekolah terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana sumber belajar. Banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya masalah keuangan untuk sekolah baik memberikan tunjangan terhadap guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran.

Menyadari pentingnya dana bagi sekolah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada dinas pendidikan dan dinas pendidikan memberikan dana tersebut kepada tiap –tiap kepala sekolah yang ada didaerah tersebut. Melalui dana bantuan operasional sekolah yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan dana BOS. Dengan adanya

dana BOS tentu menimbulkan hal yang positif bagi sekolah. Sekolah dapat lebih leluasa dan tanpa menunggu sekolah dapat melakukan berbagai program sekolah misalnya dalam penerimaan siswa baru sekolah tidak perlu lagi memungut uang dengan masyarakat, sekolah yang masih kekurangan buku-buku pelajaran untuk peserta didik dengan adanya dana BOS dapat dimanfaatkan untuk menambah koleksi perpustakaan. Sekolah yang kekurangan guru dapat dengan mudah membiayai guru honor melalui dana BOS, sekolah yang tidak ada anggaran untuk penyediaan alat peraga atau alat praktikum dengan adanya dana BOS sekolah dapat membelinya dengan anggaran tersebut, bahkan melalui pemanfaatan dana BOS sekolah juga dapat memberikan bantuan kepada peserta didik yang berada dalam kondisi kemiskinan.

Menurut Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemdiknas, Suyanto menyebutkan, penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) hingga saat ini baru mencapai 50%. Jumlah total dana BOS yang disalurkan di tahun 2010 sebanyak Rp. 16,6 triliun yang dibagi kepada 27,67 juta siswa SD dan kepada 9,92 juta siswa SMP.

Sementara itu TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) provinsi Riau, Dewi riyawati andarmari, mengatakan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk berbagai aktifitas yang erat kaitannya dengan kepentingan siswa. Penggunaan dana BOS ini akan selalu di pantau oleh pemerintah melalui BPK maupun BPKP. Jika terjadi penyimpangan akan ada sanksi hukum bagi oknum yang melanggarnya.

Dinas pendidikan Riau berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis pemerintahan daerah dibidang pendidikan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur propinsi Riau. Disini peran dinas pendidikan adalah untuk memajukan dan meningkatkan mutu suatu pendidikan, melakukan pengontrolan tiap-tiap sekolah.

Dari penjelasan dana BOS tersebut telah memberikan pemahaman bahwa melalui dana BOS bergantung berbagai harapan untuk pengembangan peserta didik dan sekolah. Jadi, didalam penggunaan dana BOS harus dipertanggung jawabkan oleh sekolah, perlu administrasi yang jelas, untuk apa digunakan, siapa yang menggunakan, mana tanda legalitas penggunaannya, dan apakah dana yang digunakan sudah benar-banar efektif untuk pendidikan.

Dalam penyelenggaraan dana BOS, maka diperlukan adanya pengontrolan atau pengawasan terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah untuk suatu pendidikan, dan untuk melakukan pengontrolan itu dibutuhkan auditor pemerintah (BPKP). Auditor tersebut merupakan auditor pemerintahan yaitu auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintahan yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan serta melakukan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan.

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa

banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison, 1999 dalam Irahandayani 2003).

Menurut Irahandayani (2003), kualitas kerja auditor dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: berkualitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan tidak berkualitas (tidak dapat dipertanggungjawabkan).

Sementara itu, Tawaf (1999) melihat kualitas hasil audit dari sisi supervisi. Menurut (Tawaf 1999 dalam Irahandayani 2003) agar audit yang dihasilkan berkualitas, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan dimulai dari awal hingga akhir penugasan audit.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pemerintah (BPKP) terhadap bukti-bukti yang ada dapat diketahui sejauh mana penyelenggaraan dana BOS pada tiap-tiap sekolah baik dikota maupun di kabupaten. Selain itu dapat juga diketahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas penyelenggaraan terhadap dana BOS.

Sementara peneliti terdahulu meneliti dengan judul pengaruh akuntabilitas dan pengetahuan terhadap kualitas hasil kerja auditor dengan variabel dependen kualitas audit dan variabel independen akuntabilitas dan pengetahuan auditor. Sedangkan peneliti Andika Dewantara dengan judul peranan auditor operasional dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pendidikan pada sekolah lapang pengendalian hama terpadu dengan variabel dependen peranan operasional dengan variabel independen efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah dari sisi tempat peneliti terdahulu melakukan penelitian di daerah jawa sedangkan

penelitian ini dilakukan di sekolah SMP kota Pekanbaru. Variabel penelitian ini variabel dependennya penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru sedangkan variabel independennya efektifitas, efisiensi dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS yang sesuai dengan judul:

“PENGARUH EFEKTIFITAS, EFISIENSI, DAN KUALITAS HASIL KERJA AUDITOR PEMERINTAH (BPKP) TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA BOS DI SMP KOTA PEKANBARU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh efektifitas auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah pengaruh efisiensi auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah pengaruh kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru?

4. Bagaimanakah pengaruh efektifitas, efisiensi, dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru secara simultan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.
4. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas, efisiensi, kualitas hasil kerja auditor pemerintah terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru secara bersama-sama.

Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini dilakukan agar memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, bermanfaat untuk menambah wawasan didalam bidang auditing khususnya auditor pemerintah.

2. Penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan masukan baik berupa saran atau koreksi sehingga dapat membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi dan dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang akan membantu auditor dalam menjalankan profesinya.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian membagi pembahasan ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Membahas tentang teori-teori pendukung sebagai dasar pemikiran dalam melakukan analisis beserta hipotesis-hipotesisnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang metode penelitian, kriteria penentuan populasi dan sampel, sampel dan metode pengambilan sampel, pengukuran variabel, pengukuran instrumen, dan teknik pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang analisis hasil penelitian yang menjelaskan tentang data serta pengujian hipotesis yang telah dikembangkan.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup membahas tentang kesimpulan penelitian yang meliputi keterbatasan penelitian dan saran dalam penelitian berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Pengaruh

Menurut kamus bahasa Indonesia kontemporer (2002;1132) pengaruh adalah: “yang menyebabkan sesuatu terjadi, baik secara langsung maupun tidak”.

B. Pengertian Audit

Menurut Mulyadi (2009:10) secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Dan M.Guy (2001:5) mendefinisikan auditing sebagai:

Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Peranan audit menurut Sukrisno Agoes (2004:175) adalah sebagai berikut :

”Pendekatan audit yang biasa dilakukan dalam suatu manajemen audit adalah menilai efisiensi, efektifitas dan keekonomisan dari masing-masing fungsi

yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan dan distribusi, fungsi sumber daya manusia, fungsi akuntansi dan fungsi keuangan”.

C. Pengertian Auditor

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.

D. Ruang Lingkup Audit Secara Umum

Menurut Sukrisno Agoes (2004:1) ditinjau dari luasnya pemeriksaan atau ruang lingkup secara umum, audit bisa dibedakan atas:

1. General Audit (Pemeriksaan Umum)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Aturan Etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta Standar Pengendalian Mutu.

2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor

tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran pelaporan keuangan secara keseluruhan.

Menurut Arens, dkk (2004: 18-21) ada tiga jenis audit yaitu:

1. Audit operasional (operational audit).
2. Audit kepatuhan (compliance audit).
3. Audit keuangan (financial statement audit).

Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta efektifitas prosedur serta metode tersebut. Umumnya pada saat selesainya audit operasional auditor akan memberikan sejumlah saran-saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan. Dalam audit operasional, tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi, tetapi juga meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, pemanfaatan komputer, metode produksi, pemasaran, dan bidang-bidang lain sesuai dengan keahlian auditor.

Audit kepatuhan bertujuan menentukan apakah klien (auditee) telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Temuan audit kepatuhan umumnya disampaikan pada seseorang di dalam unit organisasi yang diaudit daripada disampaikan pada suatu lingkup pengguna yang lebih luas.

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Umumnya, kriteria tersebut adalah pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (SAK), walaupun merupakan hal yang umum untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan yang dibuat dengan metode kas atau metode akuntansi lainnya yang cocok bagi organisasi tersebut. Laporan keuangan sering kali mencakup neraca, laba rugi, serta laporan arus kas, termasuk pula catatan atas laporan keuangan.

Audit yang selama ini dilakukan oleh para akuntan pada umumnya adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Audit keuangan ini bukan untuk mencari kesalahan atau menemukan kekurangan, walaupun dalam pelaksanaannya auditor akan memberikan perhatian yang serius terhadap kemungkinan yang terjadi kekurangan tersebut. Untuk itu dikalangan para ahli mulai memperkenalkan audit operasional yang ruang lingkungnya lebih luas dari audit keuangan, karena audit operasional tidak hanya berkisar pada masalah keuangan saja, tetapi juga mencakup masalah diluar keuangan.

Menurut Mulyadi (2009:28-29) ada tiga jenis auditor:

1. Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan

negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen.

- b. Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah.
2. Auditor Intern merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja.
3. Auditor Independen atau Akuntan Publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Namun, Arens & Loebbecke dalam bukunya *Auditing Pendekatan Terpadu* (2004:23) menambahkan satu lagi jenis auditor, yaitu:

Auditor Pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksanaan DJP dilapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Karikpa mempunyai auditor-auditor khusus. Tanggungjawab Karikpa adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan.

E. Auditor Pemerintahan

Menurut SAP (Standar Audit Pemerintahan):

“ Audit pemerintahan adalah audit atas semua kegiatan pemerintah yang meliputi pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD atau badan hukum lain yang didalamnya terdapat keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah.”

Menurut UU No. 15 tahun 2004 audit pemerintah adalah:

“ Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.”

Adapun jenis-jenis audit pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Audit Keuangan

Audit keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (di Pemda terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas .

2. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektifitas.

Adapun kelembagaan audit pemerintah adalah:

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
3. Badan Pengawasan Daerah

F. BPKP Sebagai Internal Auditor Pemerintah RI

Sebuah fakta bahwa kompleksnya penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan membuat Presiden tak mungkin dapat mengawasi secara langsung jalannya roda pemerintahan. Potensi atas adanya bias informasi kepada Presiden akan sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Presiden memerlukan penyedia informasi obyektif yang dilakukan melalui fungsi pengawasan internal. Fungsi pengawasan internal tersebut harus handal sesuai kebutuhan Presiden. Karena itu, pengawasan internal tak lagi sebatas audit dalam lingkup 'watchdog', tetapi juga mencakup aktivitas jasa konsultasi dan quality assurance. Fungsi-

fungsi itulah yang kini diemban oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (<http://www.slideshare.net/dodyzulfikar/istilah-audit>)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004, BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. Dalam kaitan ini, BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya BPKP sebagai internal auditor pemerintah kian terasa dengan adanya tuntutan masyarakat atas Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan adanya tuntutan mengenai keterbukaan dan *good governance*. BPKP melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi dan perannya sebagai pembantu Presiden di bidang pengawasan fungsional.

Tabel II.1
Perbedaan BPK dan BPKP

	BPK	BPKP
Peran	Auditor Eksternal	Auditor Internal
Tugas	Memeriksa tanggungjawab pemerintah tentang keuangan negara, memeriksa semua pelaksanaan APBN.	Melakukan pengawasan dan audit baik yang direncanakan maupun permintaan pihak tertentu, memberikan bantuan pada pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki system pengendalian manajemen.
Aktivitas	Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pelaporan hasil temuan.	Jasa audit, jasa konsultasi, asistensi, dan evaluasi, pemberantasan KKN, pendidikan dan pelatihan pengawasan, penelitian dan pengembangan pengawasan, pembinaan jabatan fungsional

		auditor, penyediaan informasi.
Posisi	Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tapi tidak berdiri sendiri.	Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI
Pelaporan Hasil Kerja	Dilaporkan ke DPR, DPD, atau DPRD sesuai kewenangannya. Dapat juga diberitahukan pada Presiden dan pembantunya	Dilaporkan kepada Presiden. Dilaporkan kepada pihak yang meminta (misalnya Pemda)
Anggota	Berbentuk Dewan, terdiri atas: seorang Ketua merangkap anggota dan 5 orang Anggota. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK diangkat Presiden atas usul DPR.	Dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh satu Sekretaris Utama dan 6 Deputi yang membawahi bidang masing-masing.

G. Efektifitas

Menurut Hamilton (2002) bahwa efektifitas menyangkut derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Menentukan tingkat pencapaian/manfaat yang diinginkan.
2. Menentukan kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

H. Efisiensi

Menurut Hamilton (2002) bahwa efisiensi dapat dirumuskan sebagai seberapa baik kemampuan organisasi menggunakan sumber daya yang telah ada dalam mencapai tujuannya.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisien.
2. Mencari dan memperbaiki penyebab terjadinya praktek yang tidak ekonomis dan tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi.

Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut. Dalam hal efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu: kemampuan untuk menghasilkan keluaran tertentu dengan menggunakan sumber data yang lebih sedikit dan kemampuan untuk menggunakan sejumlah sumberdaya tertentu untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar.

Sebagai contoh, seorang auditor dapat memeriksa badan federal untuk menentukan apakah badan tersebut telah mencapai tujuannya seperti yang ditetapkan oleh kongres (efektifitas) dan menggunakan sumberdaya keuangannya secara benar (efisiensi). Pembahasan mengenai ekonomisasi, efisiensi, dan efektifitas akan lebih mudah dipahami jika dibahas dalam kerangka Input - Proses - Output.

I. Kualitas Hasil Kerja

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison, 1999 dalam Irahandayani, 2003).

Menurut Irahandayani (2003), kualitas kerja auditor dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: berkualitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan tidak berkualitas (tidak dapat dipertanggungjawabkan). Sementara itu, (Tawaf, 1999 dalam Irahandayani, 2003) melihat kualitas hasil audit dari sisi supervisi. Agar audit yang dihasilkan berkualitas, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan dimulai dari awal hingga akhir penugasan audit.

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Menurut Edwards *et.al* (1984) dalam Irahandayani (2003) ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah keputusan yaitu *outcome oriented* dan *process oriented*.

Pendekatan *outcome oriented* digunakan jika solusi dari sebuah permasalahan atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat dipastikan. Untuk menilai kualitas keputusan yang diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pendekatan *process oriented* digunakan jika solusi sebuah permasalahan atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh auditor selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kerja seseorang adalah tingkat kerumitan pekerjaan yang dihadapi. Menurut Libby dan Lipe (1992) dalam Irahandayani (2003) kompleksitas kerja dapat dijadikan sebagai alat dalam meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. Dalam arti kata untuk tingkat kerumitan pekerjaan tertentu dapat mempengaruhi usaha yang dicurahkan oleh auditor.

Kompleksitas kerja dapat dilihat dalam dua aspek (Wood 1988 dalam Irahandayani, 2003). Pertama, kompleksitas komponen yaitu mengacu kepada jumlah informasi yang harus diproses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan dianggap semakin

rumit jika informasi yang harus diproses dan tahap-tahap yang harus dilakukan semakin banyak. Kedua, kompleksitas koordinatif yang mengacu kepada jumlah koordinasi (hubungan antara satu bagian dengan bagian lain) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan dianggap semakin rumit ketika pekerjaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya atau pekerjaan yang akan dilaksanakan tersebut terkait dengan pekerjaan sebelum dan sesudahnya.

J. Pengaruh Efektifitas, Efisiensi Dan Kualitas Hasil Kerja Auditor Pemerintah (BPKP) Terhadap Penyelenggaraan Dana Bos Di SMP Kota Pekanbaru

Jika tugas pengawasan auditor pemerintah (BPKP) telah berjalan dengan efektif dan efisien serta hasil kerjanya baik maka dapat diketahui sejauh mana penyelenggaraan dana BOS telah dijalankan ke tiap-tiap sekolah khususnya SMP. Apakah penyelenggaraan dana BOS telah berjalan sesuai dengan tujuan awal penyelenggaraan atau belum. Dengan demikian hasil pengawasan yang dilakukan oleh auditor pemerintah (BPKP) sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Dana BOS.

K. Pengertian Dana Bos

Buku Panduan BOS (2010:9) BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Buku Panduan BOS (2007:8) Biaya satuan pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Buku Panduan BOS (2006:4) Program Bantuan Operasional Sekolah BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Buku Panduan BOS (2010:2-3) Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program kejar paket A dan paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan per tahunnya sebesar:

1. SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa
2. SD/SDLB di Kabupaten : Rp 397.000,-/siswa
3. SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa
4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa

L. Pengawasan, Pemeriksaan Dan Sanksi

A. Pengawasan.

Buku panduan BOS (2010:55) Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

Pengawasan dan pemeriksaan program BOS meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat, serta pemeriksaan BPK.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota kepada sekolah dan kantor departemen agama Kabupaten/Kota kepada sekolah.

2. Pengawasan Fungsional Internal

Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan

audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan di audit.

3. Pengawasan Eksternal

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

4. Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap program BOS.

5. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat disekolah/madrasah, kabupaten/kota, propinsi dan pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS disekolah/madrasah/ponpes, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat penyimpangan dalam mengelola BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawasan fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

B. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah/madrasah/ponpes dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh

aparatus/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:

- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara.
- c. Penerapan proses hukum yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.
- d. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada kabupaten/kota dan provinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

Terkait dengan masalah buku, dalam peraturan Mendiknas No 2 Tahun 2008 disebutkan sanksi sebagai berikut:

- a. Pendidik, tenaga pendidikan, satuan pendidikan, anggota komite sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Mendiknas No.2 Tahun 2008 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Penerbit, distributor, dan/atau pengecer yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan Mendiknas No.2 Tahun 2008 ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Buku panduan BOS (2007: 35) Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Komponen utama yang dimonitor antara lain:

- a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan.
- b. Penyaluran dan penggunaan dana.
- c. Pelayanan dan penanganan pengaduan.
- d. Administrasi keuangan.
- e. Pelaporan.

Sesuai dengan peraturan dan perundangan, dana BOS diperuntukkan untuk :

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB).
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku penunjang untuk koleksi perpustakaan.
- c. Pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.

- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan siswa, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- f. Pengembangan profesi guru antara lain pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair dan perawatan lainnya.
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telpon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
- i. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah.
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan kesekolah.
- k. Pembiayaan pengelolaan BOS dan bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan jika masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran sekolah.

Penggunaan dana BOS yang dilarang:

- a. Untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; dipinjamkan kepada pihak lain; membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas sekolah.
- b. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
- c. Melakukan rehabilitasi sedang dan berat.
- d. Membangun gedung/ruangan baru.
- e. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- f. Menanam saham
- g. Dipinjamkan ke pihak lain.

M. Ketentuan Yang Harus Diikuti Sekolah Penerimaan Bos

Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi dua kelompok dengan hak dan kewajiban.

1. Apabila di sekolah/madrasah/ponpes tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah/madrasah/ponpes diwajibkan membebaskan segala jenis pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin. Sisa dana BOS bila masih ada digunakan untuk mensubsidikan siswa lain. Dengan demikian sekolah/madrasah/ponpes tersebut menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas. Bila dana BOS cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan

sekolah/madrasah/ponpes, maka otonomi sekolah/madrasah/ponpes tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan gratis.

2. Bagi sekolah/madrasah/ponpes yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidikan seluruh siswa sehingga dapat mengurangi pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah/madrasah/ponpes. Buku panduan BOS (2007:10)

Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar, untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah.

Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.
2. Bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dari segala pungutan/gratis. Namun demikian masyarakat dan orang tua siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisipasi dalam pengembangan sekolah.

3. Sekolah dapat melaksanakan semua kegiatan secara lebih profesional, transparan, mandiri, kerjasama, dan dapat dipertanggungjawabkan. Buku Panduan BOS (2007:11-12).

N. Pengujian Data

Menurut Cornelius trihendradi (2004:1) data pengujian, data penelitian memakai pengujian dengan cara SPSS. SPSS merupakan mesin analisis statistik yang handal. Mesin tersebut memerlukan input (masukan) untuk dianalisis. Input tersebut berupa hasil pengamatan atas suatu kejadian yang selanjutnya dipaparkan dalam tabel data SPSS. Pengamatan akan melibatkan pengkuantifikasian (pengukuran) atas kejadian.

O. Kerangka Konseptual

Jasa auditing digunakan secara meluas dikalangan pengusaha, pemerintah, dan organisasi yang tidak mencari keuntungan lainnya. Melalui jasa audit inilah para pengguna menaruh kepercayaan kepada akuntan pemerintah (BPKP) untuk menjalankan profesinya dalam mengaudit, agar menghasilkan informasi yang wajar tentunya harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan juga tidak menyimpang dari kode etik yang telah ditetapkan dalam standar audit pemerintahan.

Menurut Widjaya (2004), oleh karena itu auditor perlu mengawasi dan mengumpulkan bahan bukti untuk pengambilan keputusan tersebut dan tentunya bahan bukti yang dikumpulkan memadai maksudnya adalah mencukupi untuk mendukung pendapat yang diberikan.

Menurut Dan M. Guy (2001;165) Agar bukti yang dikumpulkan berguna bagi auditor, maka bukti itu harus memenuhi empat karakteristik berikut:

1. Persuasif atau meyakinkan.
2. Relevan.
3. Bebas dari bias.
4. Objektivitas.

Sesuai dengan standar audit pemerintahan mengenai standar pekerjaan lapangan bahwa: bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas pengawasan yang dilakukan oleh auditor pemerintah..

Auditor harus mengambil keputusan dalam memperoleh bahan bukti keputusan tersebut terdiri dari empat bagian yaitu:

1. Prosedur mana yang digunakan.
2. Berapa ukuran sampel.
3. Pos atau unsur tertentu mana yang dipilih dari populasi.
4. kapan prosedur-prosedur tersebut dilaksanakan.

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut sangatlah penting, karena tidak mungkin auditor memeriksa dan mengawasi seluruh bahan bukti yang tersedia dalam mengaudit laporan surat pertanggungjawabannya, karena diperlukannya biaya yang sangat besar. Yang penting auditor dapat memperoleh bahan bukti yang mencukupi, tepat waktu, handal dan relevan yang dapat

mendukung auditor dalam memberikan kesimpulan, disertai biaya yang paling rendah.

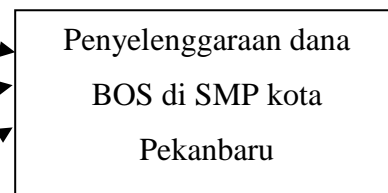
Kesimpulan yang diberikan auditor dapat menggambarkan kondisi perusahaan atau instansi yang telah diaudit oleh auditor, apakah kondisi perusahaan atau instansi tersebut dalam kondisi yang baik atau tidak.

P. Model Hipotesis

Variabel Independen (X)



Variabel Dependen (Y)



Q. Rumusan Hipotesis

Ha1 : Adanya pengaruh signifikan efektifitas auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

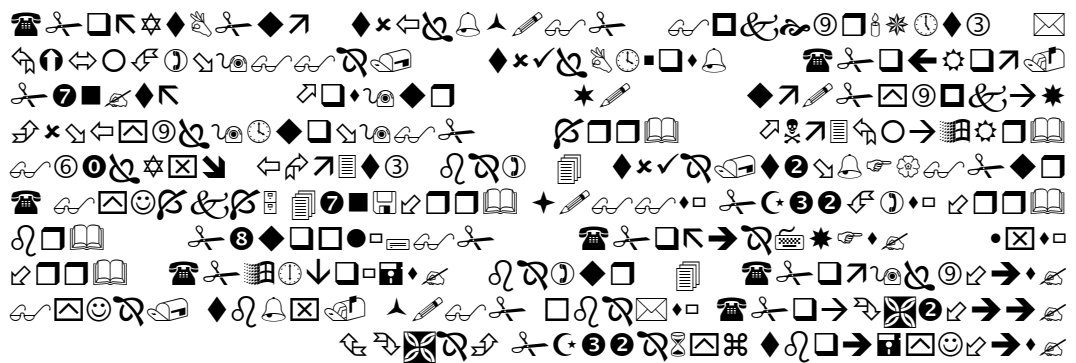
Ha2 : Adanya pengaruh signifikan efisiensi auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

Ha3 : Adanya pengaruh signifikan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

Ha4 : Adanya pengaruh signifikan efektifitas, efisiensi dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) secara bersama-sama terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

R. Pandangan Islam Terhadap Audit

Di dalam instansi pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan dana BOS di SMP, auditor pemerintah (BPKP) sangat di perlukan dalam mengawasi dana BOS ini. Dalam Al-qur'an, Allah SWT. memberikan pedoman kepada auditor pemerintah (BPKP) yang ayatnya sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’;135)

Maksud dari ayat tersebut adalah: “Auditor pemerintah (BPKP) dituntut untuk selalu menegakkan kebenaran dalam mengawasi penyelenggaraan dana BOS. Dan seorang auditor pemerintah (BPKP) tidak boleh berbohong, apabila

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar dan kecil, yang merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tulisan (Sugiyono, 2005). Menurut Indrianto dan Bambang (2002) metode ini memerlukan kontak atau hubungan langsung antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

Survey ini dilakukan dengan cara mengedarkan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan dan pernyataan yang berkaitan dengan efektifitas, efisiensi, dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru. Kemudian setiap responden dipersilahkan untuk memberikan penilaian atas pertanyaan dan pernyataan tersebut. Selanjutnya jawaban responden tersebut dianalisis secara statistik dengan bantuan SPSS.

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek, dimana data ini dihasilkan nantinya dari responden itu sendiri dapat berbentuk tanggapan (respon) tertulis sebagai hasil jawaban dari kuesioner.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah data yang penulis peroleh langsung dari responden dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kepala sekolah di SMP kota Pekanbaru.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan secara langsung (Indriantoro dan Bambang, 2002;65). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Bambang, 2002;65). Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu.

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hal penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Dwi priyatno: 2008: 9).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah di SMP kota Pekanbaru. Jumlah populasi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sebanyak 80.

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling, artinya bahwa populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (Indrianto dan Bambang, 2002; 131), sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel adalah:

1. SMP yang mendapatkan bantuan dana BOS dan terdaftar di Dinas Pendidikan.
2. Kepala sekolah SMP kota Pekanbaru
3. Responden yang mengembalikan kuesioner.

D. Defenisi Operasional Variabel Dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007 :32).

1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu sebagai berikut:

a. Efektifitas auditor pemerintah (BPKP)

Efektifitas menyangkut derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1 poin sampai 5 poin. Dimana skala 1

(sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (ragu-ragu), skala 4 (setuju), dan skala 5 (sangat setuju). Dimana skala 1 sebagai skala rendah sampai skala 5 sebagai skala tinggi.

b. Efisiensi auditor pemerintah (BPKP)

Efisiensi dapat dirumuskan sebagai seberapa baik kemampuan organisasi menggunakan sumber daya yang telah ada dalam mencapai tujuannya. Pengukuran variabel ini menggunakan skala liker 1 poin sampai 5 poin. Dimana skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (ragu-ragu), skala 4 (setuju), dan skala 5 (sangat setuju). Dimana skala 1 sebagai skala rendah sampai skala 5 sebagai skala tinggi.

c. Kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP)

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala liker 1 poin sampai 5 poin. Dimana skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (ragu-ragu), skala 4 (setuju), dan skala 5 (sangat setuju). Dimana skala 1 sebagai skala rendah sampai skala 5 sebagai skala tinggi.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen diwakili oleh penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru. Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi suatu pendidikan

dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. SMP kota Pekanbaru termasuk yang mendapatkan dana BOS dalam program pemerintah. Pengukuran variabel ini menggunakan skala liker 1 poin sampai 5 poin. Dimana skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (ragu-ragu), skala 4 (setuju), dan skala 5 (sangat setuju).

E. Pengembangan Instrumen

Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diantar langsung ke sekolah yang menjadi sampel dan dijemput satu minggu setelah pengantaran kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan tentang data responden. Bagian kedua berisi pertanyaan tentang pengaruh efektifitas, efisiensi dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru. Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dikembangkan sendiri oleh penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, metode tingkat eksplanasi, analisis dan jenis data. Menurut metodenya jenis penelitian ini adalah penelitian survey, informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner yang datanya dikumpulkan disampel dan populasi (Sugiyono:2007).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey, yaitu suatu cara penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta atau

gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dikirimkan secara langsung ke sekolah tempat responden bekerja. Pengumpulan data dimulai dari tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010. Jumlah kuesioner yang tersedia peneliti sebanyak 80 eksemplar untuk kepala sekolah di SMP kota Pekanbaru.

G. Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument dalam kuesioner harus diuji kualitas datanya atau syarat yang penting yang berlaku dalam kuesioner seperti: keharusan suatu kuesioner untuk valid dan reliable. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid atau reliable untuk variabel yang akan diukur, sehingga penelitian ini bisa mendukung hipotesis.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner (Ghazali, 2001; 142).

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan setiap item-item pertanyaan dengan total nilai setiap variabel. Korelasi setiap item pertanyaan dengan nilai total setiap variabel dilakukan dengan teknik korelasi yaitu korelasi produk momen person (bivariate pearson) untuk mengetahui apakah variabel yang

diuji valid atau tidak, hasil korelasi dibandingkan dengan angka kriteria r table korelasi dan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan diambil jika nilai hasil uji validitas lebih besar dari angka kriteria r table korelasi, maka item pertanyaan tersebut dikatakan valid. Untuk menentukan tingkat validitas peneliti menggunakan bantuan program *statistical product and service solution* (SPSS) versi 16,0.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001:140).

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode one shot atau diukur sekali saja. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukuran yang hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain. Untuk pengukuran reliabilitas, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach alpa* (α) > 60% (Nunnaly, 1967).

H. Uji Normalitas Data

Asumsi normalitas untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak

(Ghozali,2001:110). Untuk melihat normalitas data dapat dilakukan dengan cara menggunakan uji *One Sampel Kolmogorof-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 (Priyatno, 2008:28).

I. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yang meliputi Multikolinearitas, Autokorelasi, dan Heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinieritas

Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol (Ghozali,2001;91).

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *variance inflation factor* atau VIF yang merupakan kebalikan dari toleransi sehingga formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{VIF} = \frac{1}{(1 - R^2)}$$

Dimana R^2 merupakan koefisien determinasi. Bila toleransi kecil artinya menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu bila $VIF > 5$ maka dianggap ada multikolinieritas dengan variable bebas lainnya, sebaliknya jika nilai $VIF < 5$ maka dianggap tidak ada multikolinieritas (Santoso, 2001).

2. Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian waktu (pada *time series data*) atau tersusun dalam rangkaian ruang (pada *cross section data*) jika terjadi korelasi berarti terdapat problem autokorelasi (Ghozali,2001;95).

Pada penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan menggunakan Durbin Wetson Test, yaitu:

- a) Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif.
- b) Jika angka Durbin Watson (DW) berada diantara -2 sampai $+2$ berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Jika angka Durbin Wetson (DW) diatas $+2$ maka terdapat autokorelasi negatif.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dalam sebuah model regresi dengan tujuan bahwa apakah suatu regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varians

dari nilai residual penelitian. Untuk membuktikan ada tidaknya gangguan heteroskedastisitas dapat dilihat melalui program diagram pencar (*Scatterplot*). Jika *Scatterplot* membentuk pola tertentu (menyebar), maka regresi tidak mengalami heteroskedastisitas (Santoso,2001;154).

J. Uji Hipotesis

Telah dijelaskan bahwa variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru sebagai variabel dependen, akan dipengaruhi oleh variabel independen seperti efektifitas, efisiensi, dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP). Karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen, maka digunakan persamaan regresi linear berganda yang diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penyelenggaraan Dana BOS di SMP kota Pekanbaru

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi model

X₁ = efektifitas

X₂ = efisiensi

X₃ = kualitas hasil kerja

e = Error term

b₁,b₂,b₃ = Koefisiensi Regresi Parsial

Dalam analisis regresi linear berganda ini selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan

variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan alpha (tingkat kesalahan) 5 %, sehingga tingkat keyakinan 95 %.

Untuk memperoleh simpulan dari analisis ini, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis secara individual (parsial) dan secara menyeluruh (simultan). Untuk menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat dilakukan dengan uji t, sedangkan pengujian hipotesis kelima dilakukan dengan uji F.

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dengan menggunakan *t-test* dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{\text{Koefisien regresi } (b_i)}{S \text{ tan dar deviasi } (Sb_i)}$$

Level of Significance yang digunakan adalah 5% dan dasar pengambilan keputusan apakah H_a diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} , apabila :

- a. $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima, karena terdapat pengaruh yang besar.
- b. $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak karena, tidak terdapat pengaruh yang besar.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis uji F

ini dilakukan dengan cara membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} . Dan F_{hitung} dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (N - K)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

N = Jumlah sampel

Dan dasar pengambilan keputusan apakah H_a diterima atau ditolak adalah dengan pedoman sebagai berikut:

- a. H_a diterima bila $F_{hitung} < F_{tabel}$
- b. H_a ditolak bila $F_{hitung} > F_{tabel}$

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

Untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dilihat dari koefisien korelasi yang paling besar.

Selanjutnya, pengolahan data penelitian ini menggunakan *multiple regression* dengan bantuan program computer SPSS (*Statiscal Product and Service Solution*) versi 16.0 Metode Enter.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pre Test

Pembahasan bab ini meliputi hasil penelitian dengan menggunakan metode kuesioner pre test terlebih dahulu, dikarenakan ini merupakan penelitian untuk pertama kali dalam ruang lingkupnya sehingga menguji kualitas data dari kuesioner yaitu validitas, reabilitas dan normalitas data yaitu untuk mengukur variabel dependen yaitu penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru atas variabel independen yang meliputi efektifitas, efisiensi, dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP). Dengan begitu, peneliti menyebarkan kuesioner pada tanggal 6 Desember 2010 sampai 11 Desember 2010 kepada 44 responden dengan sampel penelitiannya adalah kepala sekolah SMP kota Pekanbaru. Dari hasil penyebaran kuesioner, total yang kembali kepada peneliti yaitu sebanyak 37 responden.

Setelah semua data terkumpul dari hasil penyebaran kuesioner dari kepala sekolah SMP kota Pekanbaru, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap data yang disajikan dalam tabel kualitas data, dan dapat diambil kesimpulan dari uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas.

a.1 Uji Validitas

a.1.1 Variabel Efektifitas Auditor Pemerintah (BPKP) (X1)

Tabel IV.1
Rekapitulasi Pre Test Uji Validitas
Variabel Efektifitas Auditor Pemerintah (BPKP)

Butir pernyataan (1)	Tabel r (2)	<i>Pearson Korelation (3)</i>	Keterangan
1	0,325	0,444	Valid
2	0,325	0,800	Valid
3	0,325	0,611	Valid
4	0,325	0,554	Valid
5	0,325	0,498	Valid
6	0,325	0,547	Valid
7	0,325	0,567	Valid
8	0,325	0,509	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.1 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan pada kolom 1, pada kolom 2 merupakan nilai kriteria dalam penelitian ini kriteria yang diambil adalah 0,325. Sedangkan pada kolom 3 adalah person korelation yang merupakan realisasi perhitungan validitas data. Dari kolom 3 terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP) diatas 0,325, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP) adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

a.1.2 Uji Validitas Variabel Efisiensi Auditor Pemerintah (BPKP) (X2)

Tabel IV.2
Rekapitulasi Pre Test Uji Validitas
Variabel Efisiensi Auditor Pemerintah (BPKP)

Butir pertanyaan (1)	Tabel r (2)	<i>Pearson Korelation</i> (3)	Keterangan
1	0,325	0,494	Valid
2	0,325	0,653	Valid
3	0,325	0,665	Valid
4	0,325	0,386	Valid
5	0,325	0,494	Valid
6	0,325	0,562	Valid
7	0,325	0,316	Tidak Valid
8	0,325	0,251	Tidak Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.2 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan pada kolom 1, pada kolom 2 merupakan nilai kriteria dalam penelitian ini kriteria yang diambil adalah 0,325. Sedangkan pada kolom 3 adalah person korelation yang merupakan realisasi perhitungan validitas data. Dari kolom 3 terlihat bahwa butir pertanyaan 7 dan 8 efisiensi auditor pemerintah (BPKP) lebih kecil dari angka kriteria ($<0,325$), sehingga tidak valid. Sedangkan pertanyaan 1,2,3,4,5 dan 6 untuk variabel efisiensi auditor pemerintah (BPKP) lebih besar dari angka kriteria ($>0,325$), sehingga dapat disimpulkan bahwa statistik masing-masing indikator pertanyaan 1,2,3,4,5 dan 6 untuk variabel efisiensi auditor pemerintah (BPKP) adalah valid dan layak digunakan sebagai data penelitian.

a.1.3 Uji Validitas Variabel Kualitas Hasil Kerja Auditor Pemerintah (BPKP)

Tabel IV.3
Rekapitulasi Pre Test Uji Validitas
Variabel Kualitas Hasil Kerja Auditor Pemerintah (BPKP)

Butir pernyataan (1)	Tabel r (2)	Pearson Korelation(3)	Keterangan
1	0,325	0,551	Valid
2	0,325	0,681	Valid
3	0,325	0,627	Valid
4	0,325	0,200	Tidak Valid
5	0,325	0,665	Valid
6	0,325	0,621	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.3 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan pada kolom 1, pada kolom 2 merupakan nilai kriteria dalam penelitian ini kriteria yang diambil adalah 0,325. Sedangkan pada kolom 3 adalah person korelation yang merupakan realisasi perhitungan validitas data. Dari kolom 3 terlihat bahwa butir pertanyaan 4 kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) lebih kecil dari angka kriteria ($<0,325$), sehingga tidak valid. Sedangkan pertanyaan 1,2,3,5 dan 6 untuk variabel kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) lebih besar dari angka kriteria ($>0,325$), sehingga dapat disimpulkan bahwa statistik masing-masing indikator pertanyaan 1,2,3,5 dan 6 untuk variabel kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) adalah valid dan layak digunakan sebagai data penelitian.

a.1.4 Uji Validitas Variabel Penyelenggaraan Dana BOS Di SMP Kota
Pekanbaru

Tabel IV.4
Rekapitulasi Pre Test Uji Validitas
Variabel Penyelenggaraan Dana BOS Di SMP Kota Pekanbaru

Butir pernyataan (1)	Tabel r (2)	<i>Pearson Korelation(3)</i>	Keterangan
1	0,325	0,784	Valid
2	0,325	0,473	Valid
3	0,325	0,784	Valid
4	0,325	0,618	Valid
5	0,325	0,416	Valid
6	0,325	0,597	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.4 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan variabel penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru di atas kriteria 0,325, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

a.2 Uji Reliabilitas

Tabel IV.5
Rekapitulasi Hasil Pre Test Uji Reliabelitas

Variabel (1)	Jumlah item (2)	Kriteria (3)	<i>Cronbach's Alpha</i> (4)	Keterangan (5)
Efektifitas Auditor Pemerintah (BPKP)	8	0,60	0,686	Reliabel
Efisiensi Auditor Pemerintah (BPKP)	6	0,60	0,640	Reliabel
Kualitas Hasil Kerja Auditor Pemerintah (BPKP)	5	0,60	0,622	Reliabel
Penyelenggaraan Dana BOS Di SMP Kota Pekanbaru	6	0,60	0,674	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Pada tabel IV.5 diatas terlihat bahwa uji reliabilitas pada kolom 1 merupakan variabel yang diteliti, pada kolom 2 merupakan jumlah item pertanyaan untuk setiap variabel sedangkan pada kolom 3 merupakan nilai kriteria, untuk reliabel nilai kriteria yang diambil adalah 0,60, untuk kolom 4 adalah *Cronbach's Alpha* yang merupakan realisasi perhitungan reliabilitas data. Dari kolom 4 menunjukkan bahwa variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP) mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,686, variabel efisiensi auditor pemerintah (BPKP) mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,640, variabel kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,622 dan variabel penyelenggaraan dana BOS di SMP kota

Pekanbaru mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,674. Berdasarkan kriteria nunnally (1967), maka semua pertanyaan tentang variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP), variabel efisiensi auditor pemerintah (BPKP), variabel kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) dan variabel penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru, dapat dikatakan reliabel dan layak digunakan sebagai data penelitian karena nilai *Cronbach's Alpha* variabel *Responsibility* diatas 60%.

a.3 Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

Tabel IV.6
Hasil Pre Test Uji Normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru	efektifitas auditor pemerintah (BPKP)	efisiensi auditor pemerintah (BPKP)	kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP)
N		37	37	37	37
Normal Parameters ^a	Mean	26.51	35.43	33.73	24.54
	Std. Deviation	1.805	2.398	1.895	1.909
Most Extreme Differences	Absolute	.134	.139	.144	.129
	Positive	.134	.139	.144	.125
	Negative	-.120	-.104	-.127	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		.817	.846	.874	.785
Asymp. Sig. (2-tailed)		.516	.471	.430	.569

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel IV.6 diatas, dapat kita lihat pada kolom *Kolmogorov-Sminornov* Z dengaf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5 % atau 0,05. Dan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk

efektifitas sebesar 0,817; untuk efisiensi sebesar 0,846; untuk kualitas hasil kerja sebesar 0,874; dan untuk penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru sebesar 0,785 , maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel efektifitas, variabel efisiensi, variabel kualitas hasil kerja dan variabel penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru berdistribusi normal.

B. Pengembalian Kuesioner dan Demografi Responden

Teknik pengumpulan data telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa populasi penelitian yaitu seluruh kepala sekolah SMP kota Pekanbaru. Sedangkan kuesioner yang disebarakan kepada responden secara keseluruhan adalah 80 kuesioner. Penyebaran kuesioner dimulai tanggal 15 Desember 2010 sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 22 Desember 2010. Jumlah kuesioner yang terkumpul kembali hanya 51 kuesioner. Semua kuesioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah yaitu 51 kuesioner. Tingkat pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.7
Tingkat Pengumpulan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang disebarakan	80	100 %
Total kuesioner yang terkumpul kembali	51	64%
Total kuesioner yang tidak terkumpul kembali	29	36%
Total kuesioner yang dapat diolah	51	64%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel IV.7 dapat dijelaskan bahwa peneliti menyebarkan 80 kuesioner. Kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 51 kuesioner atau 64%. Sedangkan kuesioner yang tidak terkumpul kembali adalah 29 kuesioner atau 36%. Jadi, total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan adalah 51 kuesioner atau 64%.

Tabel IV.8
Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jabatan		
Kepala sekolah	37	73%
Wakil kepala sekolah	14	27%
Guru	-	-
Jenis Kelamin		
Pria	39	76%
Wanita	12	24%
Jenjang Pendidikan		
Diploma 3	-	-
Strata 1	43	84%
Strata 2	8	16%
Pengalaman Kerja		
3 s/d 5 tahun	10	20%
6 s/d 10 tahun	29	57%
Lebih dari 10 tahun	12	23%
Kepemilikan SK Kerja		
Tidak memiliki	-	-
Memiliki	51	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel IV.8 diatas, dapat dilihat bahwa persentase data demografi responden berdasarkan jabatan dalam penelitian ini adalah 37 responden yang berjabat sebagai kepala sekolah atau 73%, 14 responden yang berjabat sebagai wakil kepala sekolah atau 27%. Jenis kelamin didominasi oleh pria yaitu sebanyak 39 responden atau 76% dan wanita sebanyak 12 responden atau 24%. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah 0 responden atau 0% mempunyai pendidikan terakhir diploma, 43 responden atau 84%

mempunyai pendidikan terakhir strata 1, 8 responden atau 16% mempunyai pendidikan terakhir strata 2. Pengalaman kerja responden dalam penelitian ini adalah 10 responden atau 20% pengalaman kerja 3 s/d 5 tahun, 29 responden atau 57 % pengalaman kerja 6 s/d 10 tahun, dan 12 responden atau 23% pengalaman kerja lebih dari 10 thn. Sedangkan kepemilikan SK yang memiliki 51 responden atau 100% dan yang tidak memiliki SK 0 responden atau 0 %.

C. Analisis Data

Gambaran mengenai variabel-variabel atau faktor penelitian pertama efektifitas auditor pemerintah (BPKP), kedua efisiensi auditor pemerintah (BPKP), ketiga kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) dan keempat penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap data yang disajikan dalam tabel kualitas data , uji asumsi klasik dan uji regresi.

1. Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner harus diuji kualitas datanya atau syarat yang penting yang berlaku dalam kuesioner seperti: keharusan suatu kuesioner untuk valid dan reliabel. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid dan reliable untuk variabel yang akan diukur, sehingga penelitian ini bisa mendukung hipotesis.

Pengujian validitas dilakukan secara keseluruhan terhadap seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan dilakukan dengan *one shot method*, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran untuk menguji validitas dari instrumen penelitian (Ghozali, 2001:25). Sedangkan penulis melakukan pengukuran reliabilitas dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* guna menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan.

a. Uji Validitas (*Bivariate Person*)

Dalam pengujian yang peneliti lakukan untuk mengetahui kualitas data, layak atau tidaknya suatu data untuk diangkat, maka peneliti menganalisis data dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Dan dalam uji validitas yang peneliti lakukan, penulis menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan dilakukan dengan *one shot method*, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran saja. Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai *Pearson Korelation* lebih besar dari nilai *r* tabel, *r* tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n)= 51, maka *r* tabelnya adalah 0,276. Untuk variabel independen dan dependen, dari hasil uji validitas dapat disajikan sebagai berikut:

a.1 Variabel Efektifitas Auditor Pemerintah (BPKP) (X1)

Tabel IV.9
Rekapitulasi Uji Validitas
Variabel Efektifitas Auditor Pemerintah (BPKP)

Butir pernyataan (1)	Tabel r (2)	Pearson Korelation(3)	Keterangan
1	0,276	0,238	Tidak Valid
2	0,	0,479	Valid
3	0,276	0,538	Valid
4	0,276	0,607	Valid
5	0,276	0,217	Tidak Valid
6	0,276	0,560	Valid
7	0,276	0,661	Valid
8	0,276	0,557	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.9 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan pada kolom 1, pada kolom 2 merupakan nilai kriteria dalam penelitian ini kriteria yang diambil adalah 0,276. Sedangkan pada kolom 3 adalah person korelation yang merupakan realisasi perhitungan validitas data. Dari kolom 3 terlihat bahwa butir pertanyaan 1 dan 5 efektifitas auditor pemerintah (BPKP) lebih kecil dari angka kriteria ($<0,276$), sehingga tidak valid. Sedangkan pertanyaan 2,3,4,6,7 dan 8 untuk variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP) lebih besar dari angka kriteria ($>0,276$), sehingga dapat disimpulkan bahwa statistik masing-masing indikator pertanyaan 2,3,4,6,7 dan 8 untuk variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP) adalah valid dan layak digunakan sebagai data penelitian.

a.2 Variabel Efisiensi Auditor Pemerintah (BPKP) (X2)

Tabel IV.10
Rekapitulasi Uji Validitas
Variabel Efisiensi Auditor Pemerintah (BPKP)

Butir pertanyaan (1)	Tabel r (2)	<i>Pearson Korelation(3)</i>	Keterangan
1	0,276	0,553	Valid
2	0,276	0,514	Valid
3	0,276	0,552	Valid
4	0,276	0,614	Valid
5	0,276	0,583	Valid
6	0,276	0,713	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.10 diatas, dapat terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan variabel efisiensi auditor pemerintah (BPKP) di atas 0,276, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel efisiensi auditor pemerintah (BPKP) adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

a.3 Variabel Kualitas Hasil Kerja Auditor Pemerintah (BPKP) (X3)

Tabel IV.11
Rekapitulasi Uji Validitas
Variabel Kualitas Hasil Kerja Auditor Pemerintah (BPKP)

Butir pernyataan (1)	Tabel r (2)	<i>Pearson Korelation(3)</i>	Keterangan
1	0,276	0,817	Valid
2	0,276	0,881	Valid
3	0,276	0,697	Valid
4	0,276	0,881	Valid
5	0,276	0,822	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.11 diatas, dapat terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan variabel kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) di atas 0,276, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

a.4 Variabel Penyelenggaraan Dana BOS Di SMP Kota Pekanbaru (Y)

Tabel IV.12
Rekapitulasi Uji Validitas
Variabel Penyelenggaraan Dana BOS Di SMP Kota Pekanbaru

Butir pernyataan (1)	Tabel r (2)	<i>Pearson Korelation</i>(3)	Keterangan
1	0,276	0,667	Valid
2	0,276	0,687	Valid
3	0,276	0,719	Valid
4	0,276	0,568	Valid
5	0,276	0,516	Valid
6	0,276	0,562	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.12 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan variabel penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru di atas kriteria 0,276, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing indikator pernyataan untuk variabel penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

b. Uji Reliabilitas (*Cronbach's Alpha/ One Shot*)

Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* menggunakan SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0.60 (Nunnally, 1967). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *one shot* atau diukur sekali saja.

Tabel IV.13
Rekapitulasi Hasil Uji Reliabelitas

Variabel (1)	Jumlah item (2)	Kriteria (3)	<i>Cronbach's Alpha</i> (4)	Keterangan (5)
Efektifitas Auditor Pemerintah (BPKP)	6	0,60	0,678	Reliabel
Efisiensi Auditor Pemerintah (BPKP)	6	0,60	0,623	Reliabel
Kualitas Hasil Kerja Auditor Pemerintah (BPKP)	5	0,60	0,875	Reliabel
Penyelenggaraan Dana BOS Di SMP Kota Pekanbaru	6	0,60	0,680	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Pada tabel IV.13 diatas terlihat bahwa uji reliabelitas pada kolom 1 merupakan variabel yang diteliti, pada kolom 2 merupakan jumlah item pertanyaan untuk setiap variabel sedangkan pada kolom 3 merupakan nilai kriteria, untuk reliabel nilai kriteria yang diambil adalah 0,60, untuk kolom 4 adalah *Cronbach's Alpha* yang merupakan realisasi perhitungan reliabilitas data. Dari kolom 4 menunjukkan bahwa variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP) mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,678, variabel efisiensi auditor

pemerintah (BPKP) mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,623, variabel kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,875 dan variabel penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,680. Berdasarkan kriteria nunnally (1967), maka semua pertanyaan tentang variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP), variabel efisiensi auditor pemerintah (BPKP), variabel kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) dan variabel penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru, dapat dikatakan reliabel dan layak digunakan sebagai data penelitian karena nilai *Cronbach's Alpha* variabel *Responsibility* diatas 60%.

2. Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata jawaban responden berdistribusi dengan normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini peneliti akan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5 % atau 0,05.

Tabel IV.14
Hasil Uji Normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Tests of Normality			
		penyelenggara an dana BOS di SMP kota Pekanbaru	efektifitas auditor pemerintah (BPKP)	efisiensi auditor pemerintah (BPKP)	kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP)
N		51	51	51	51
Normal Parameters ^a	Mean	25.75	35.20	24.80	21.16
	Std. Deviation	1.948	2.117	2.350	2.509
Most Extreme Differences	Absolute	.178	.117	.144	.205
	Positive	.178	.106	.144	.168
	Negative	-.107	-.117	-.131	-.205
Kolmogorov-Smirnov Z		1.274	.833	1.026	1.462
Asymp. Sig. (2-tailed)		.078	.491	.243	.028

a. Test distribution is Normal

Dari tabel IV.14 diatas, dapat kita lihat pada kolom *Kolmogorov-Smirnov Z* dan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk efektifitas sebesar 0,833; untuk efisiensi sebesar 1,026; untuk kualitas hasil kerja sebesar 1,462; dan untuk penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru sebesar 1,274 , maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel efektifitas, variabel efisiensi, variabel kualitas hasil kerja dan variabel penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru berdistribusi normal.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Tabel IV.15
Rekapitulasi Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel (1)	<i>Tolerance</i> (2)	VIF (3)	Keterangan (4)
Efektifitas	0,949	1,053	Bebas Multikolinearitas
Efisiensi	0,807	1,240	Bebas Multikolinearitas
Kualitas Hasil Kerja	0,837	1,195	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.15 diatas, pada kolom 1 merupakan variabel yang diteliti, pada kolom 2 merupakan nilai *tolerance*, sedangkan pada kolom 3 adalah besarnya *VIF* (*Varian Inflation Factor*). Dari kolom 2 dan 3 dapat dilihat bahwa variabel efektifitas sebesar 1,053, efisiensi sebesar 1,240, serta kualitas hasil kerja sebesar 1,195. Dikarenakan *VIF* di atas angka 1 dan memiliki *Tolerance* mendekati angka 1 dan memiliki variabel lebih kecil dari 5, maka bisa disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas dan layak digunakan.

b. Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian waktu (pada *time series data*) atau tersusun

dalam rangkaian ruang (pada *cross section data*) jika terjadi korelasi berarti terdapat problem autokorelasi (Ghozali,2001:95).

Pada penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan menggunakan Durbin-Test, yaitu:

- 1) Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif.
- 2) Jika angka Durbin Watson (DW) berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +2 maka terdapat autokorelasi negatif.

Hasil Uji Autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW Test) disimpulkan sebagai berikut:

Tabel IV.16
Rekapitulasi Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin-Watson	Keterangan
Efektifitas	1,895	Tidak Autokorelasi
Efisiensi	1,895	Tidak Autokorelasi
Kualitas Hasil Kerja	1,895	Tidak Autokorelasi

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.16 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson masing-masing variabel independen adalah sebesar 1,895. Dan karena nilai Durbin-Watson masing-masing variabel independen berada di antara -2 sampai +2 yaitu 1,895 maka dapat disimpulkan bahwa regresi ini baik dan bebas dari autokorelasi.

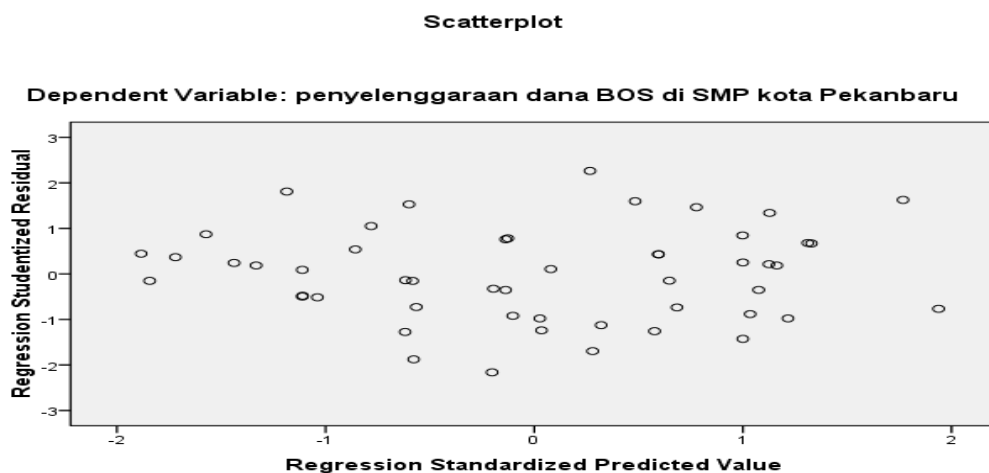
c. Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan dalam mendeteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik plot prediksi variabel dependen, yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dengan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji plot dapat disimpulkan sebagai berikut:

Grafik IV.1 Scatterplot Dependent Variable



Sumber: Data primer yang diolah

Dari grafik IV.1 diatas, terlihat titik menyebar secara acak atau tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti model regresi layak untuk memprediksikan variabel dependen berdasarkan masukkan variabel independen.

Dari hasil uji asumsi klasik terhadap variabel-variabel independen diatas, dapat disimpulkan bahwa data-data diatas lolos dari uji asumsi klasik dan uji kualitas data dan data diatas bisa dipakai pada proses selanjutnya, yaitu pada pengujian hipotesis.

D. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan alat analisis regresi linear berganda, karena dalam modelnya memasukkan beberapa variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif juga apakah nilai variabel telah signifikan atau tidak signifikan dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel mengalami kenaikan atau penurunan. Dibawah ini adalah hasil pengujian data dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS.

Tabel IV.17
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	40.197	5.015		8.015	.000
efektifitas auditor pemerintah (BPKP)	-.326	.125	-.354	-2.597	.013
efisiensi auditor pemerintah (BPKP)	-.132	.123	-.160	-1.080	.286
kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP)	.014	.113	.018	.124	.902

a. Dependent Variable: penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru

Sumber: Data primer yang diolah

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y' = 40,197 + (-0,326) X_1 + (-0,132)X_2 + 0,014 X_3 + e$$

Keterangan:

Y' = penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi

X₁ = Efektifitas

X₂ = Efisiensi

X₃ = Kualitas hasil kerja

e = Error term

Persamaan regresi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 40,197; artinya jika pengaruh yang diperoleh dari efektifitas (X_1), efisiensi (X_2), dan kualitas hasil kerja (X_3), nilainya adalah 0, maka penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru (Y') nilainya adalah 40,197
- b. Koefisien regresi variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP) (X_1) sebesar -0,326; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pengaruh efektifitas auditor pemerintah (BPKP) naik 1%, maka penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru (Y') akan mengalami penurunan sebesar -0,326. Koefisien bernilai negatif, artinya terjadi hubungan negatif antara efektifitas auditor pemerintah (BPKP) dengan penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.
- c. Koefisien regresi variabel efisiensi auditor pemerintah (BPKP) (X_2) sebesar -0,132; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan efisiensi auditor pemerintah (BPKP) mengalami kenaikan 1%, maka penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru (Y') akan mengalami penurunan sebesar -0,132. Koefisien bernilai negatif, artinya terjadi hubungan negatif antara efisiensi auditor pemerintah (BPKP) dengan penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.
- d. Koefisien regresi variabel kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) (X_3) sebesar 0,014; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) mengalami kenaikan 1%, maka penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru (Y') akan mengalami

kenaikan sebesar 0,014. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) dengan penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

1. Pengujian Variabel Secara Parsial (Uji t)

Ha₁ : “Efektifitas auditor pemerintah (BPKP) berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.”

Tabel IV.18
Hasil uji t variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP)
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40,197	5,015		8,015	,000
	Efektifitas auditor pemerintah (BPKP)	-,326	,125	-,354	-2,597	,013

a Dependent Variabel: penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.18 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah sebesar -2,597. Oleh karena nilai t hitung < t tabel (-2,597 < 2,011), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₁ ditolak.

Tetapi untuk variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP) (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,013 (kecil dari $\alpha=5\%$). Artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara efektifitas auditor pemerintah (BPKP) dengan penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H_1) yang diajukan, karenanya hasil pengujian ini menunjukkan bahwa efektifitas auditor pemerintah (BPKP) mempengaruhi penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

H_{a2} : “Efisiensi auditor pemerintah (BPKP) berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru”

Tabel IV.19
Hasil uji t variabel efektifitas auditor pemerintah (BPKP)
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40,197	5,015		8,015	,000
	Efisiensi auditor pemerintah (BPKP)	-,132	,123	-,160	-1,080	,286

a Dependent Variable: penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.19 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah sebesar -1,080. Oleh karena nilai t hitung < t tabel (-1,080 < 2,011), maka H_2 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara efisiensi auditor pemerintah (BPKP) dengan penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

Untuk variabel efisiensi auditor pemerintah (BPKP) (X_2) memiliki nilai signifikan sebesar 0,286 (besar dari $\alpha=5\%$), maka hasil ini tidak mendukung hipotesis kedua (H_2) yang diajukan, karenanya hasil pengujian ini menunjukkan bahwa efisiensi auditor pemerintah (BPKP) tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

Ha₃ : “Kualitas hasil kerja auditor pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru”

Table IV.20
Hasil uji t variabel kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP)
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40,197	5,015		8,015	,000
	Kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP)	,014	,113	,018	,124	,902

a Dependent Variable: penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru

Sumber: Data primer yang diolah

Dari table IV.20 diatas, dapat diketahui nilai t hitungnya adalah sebesar 0,124. Oleh karena nilai t hitung < t tabel ($0,124 < 2,011$), maka H₃ ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) dengan penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

Untuk variabel kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) (X₃) memiliki nilai signifikan sebesar 0,902 (besar dari $\alpha=5\%$), maka hasil ini tidak mendukung hipotesis tiga (H₃) yang diajukan, karenanya hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

2. Pengujian Variabel Secara Simultan (Uji F)

H_{a4} : “Secara bersama-sama variabel independen (efektifitas, efisiensi, dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.”

Tabel IV.21
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.460	3	10.820	3.234	.030 ^a
	Residual	157.226	47	3.345		
	Total	189.686	50			

a. Predictors: (Constant), kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP), efektifitas auditor pemerintah (BPKP), efisiensi auditor pemerintah (BPKP)

b. Dependent Variable: penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel IV.21 diatas, bila dilihat dari uji F perlu dibandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis keempat ini ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui hasilnya sebagai berikut:

F hitungnya adalah sebesar 3,234

F tabel adalah sebesar 2,798

F hitung > F tabel (3,234 > 2,798), maka H_4 ditolak.

Tetapi bila dilihat dari nilai signifikansi nya, model satu untuk semua variabel independen diperoleh angka signifikan (*p value*) sebesar 0,030 yang berarti bahwa efektifitas, efisiensi dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyelenggaraan dana BOS

di SMP kota Pekanbaru dengan tingkat kesalahan 3%. Karena angka ini lebih kecil dari $\alpha=5\%$, maka dapat dikatakan bahwa model ini layak digunakan (signifikan) dan H_4 diterima.

Dengan demikian, efektifitas auditor pemerintah (BPKP), efisiensi auditor pemerintah (BPKP) dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru. Oleh karena itu, hipotesis keempat pada penelitian ini diterima yang artinya secara bersama-sama ada pengaruh signifikan antara efektifitas auditor pemerintah (BPKP), efisiensi auditor pemerintah (BPKP) dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Berikut adalah tabel hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) dengan menggunakan aplikasi SPSS:

Tabel IV.22
Hasil Analisis Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.414 ^a	.171	.118	1.829

a. Predictors: (Constant), kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP), efektifitas auditor pemerintah (BPKP), efisiensi auditor pemerintah (BPKP)

b. Dependent Variable: penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel IV.22 diatas, diperoleh nilai R^2 (*R Square*) sebesar 0,171 atau 17,1%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (efektifitas auditor pemerintah (BPKP), efisiensi auditor pemerintah (BPKP) dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) terhadap variabel dependen (penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru) sebesar 17,1%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (efektifitas, efisiensi dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) kurang mampu menjelaskan sebesar 17,1% variabel dependen (penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru). Sedangkan sisanya sebesar 82,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh efektifitas, efisiensi dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda yang telah dijelaskan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa efektifitas auditor pemerintah (BPKP) mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru, yaitu tercermin dari nilai t hitung $-2,597$ dengan signifikan $0,013$ (kecil dari $\alpha=5\%$) dan t tabel $2,011$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 gagal ditolak, ini berarti efektifitas auditor pemerintah (BPKP) berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.
2. Pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa efisiensi auditor pemerintah (BPKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru, yaitu tercermin dari nilai t hitung sebesar $-1,080$ dengan signifikan $0,286$ (besar dari $\alpha=5\%$) dengan t tabel sebesar $2,011$. Karena $-1,080 < 2,011$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak, ini berarti efisiensi auditor pemerintah (BPKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

3. Pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru, yaitu tercermin dari nilai t hitung sebesar 0,124 dengan signifikan 0,902 (besar dari $\alpha=5\%$) dengan t tabel sebesar 2,011. Karena $0,124 < 2,011$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak, ini berarti kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.
4. Hasil pengujian secara serentak (uji F) juga menerima hipotesis ke 4, yaitu tercermin dari nilai f hitung sebesar 3,234 dengan signifikan 0,030 (kecil dari $\alpha=5\%$) dengan f tabel sebesar 2,798. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama efektifitas, efisiensi dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP) mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

B. Keterbatasan

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Faktor-faktor yang digunakan untuk menguji penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru dalam penelitian ini hanya terbatas pada efektifitas, efisiensi dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah (BPKP), untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan unsur-unsur yang lain sebagai

faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit dan hanya terfokus pada kepala sekolah SMP kota Pekanbaru.
3. Dalam penelitian ini pengukuran penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru hanya ditinjau dari aspek pengawasan yang dilakukan BPKP dalam penyelenggaraan dana BOS, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat meninjau dari aspek yang lain.

C. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain :

1. Pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien merupakan syarat bagi BPKP dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan dana BOS. Auditor pemerintah khususnya BPKP yang mendapat tugas dari pemerintah diusahakan benar-benar melakukan pengawasannya secara efektif agar tidak ada kecurangan ataupun penyelewengan dalam penyelenggaraan dana BOS ini, karena dana BOS sangat penting bagi sekolah khususnya SMP agar sekolah bisa meningkatkan sarana dan prasarana sekolah sehingga menjadikan sekolah tersebut berkualitas.
2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan dana BOS di SMP kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Nurkarim dan terjemahan, 2009. QS. An-Nisa: 135
- Al-Qur'an Nurkarin dan terjemahan, 2009. QS. Al-Baqarah: 42
- Arens, Elder and Beasley, 2003, *Auditing and Assurance Service an Integrated Approach*, 9 th Edition, New Jersey : Pearson Education, Inc
- Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 2006
- Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku, 2007
- Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 2010
- Cornelius trihendradi. 2004. *Pengolahan Data Dengan Menggunakan SPSS*. Jakarta : BPFE
- Dan M.Guy, 2001, *Auditing*, penerbit Salemba Empat
- Dewantara, Andika. 2006. *Peranan Auditor Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu*. Bandung. Skripsi S1 : Universitas Widyatama. (Tidak dipublikasikan)
- Ghozali, Imam.2005. *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*. Semarang : BP Undip
- Hamilton, Alexander,Ph.D. "Manajemen Auditing, meningkatkan efektivitas dan efisiensi", penerbit Modern Business New York, 2002."
- <http://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/hubungan-peranan-audit-operasional-dalam-menunjang-efektivitas-sistem-pengendalian-intern-penjualan/>
- <http://www.kapjimmybudhi.com/auditor.html>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Auditor>
- <http://www.slideshare.net/dodyzulfikar/istilah-audit>
- Indrianto N. dan Bambang S. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Jogjakarta: BPFE
- Irahandayani, Devi.2003. *Pengaruh Sikap Mental Atas Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal*. Skripsi Universitas Trisakti, Jakarta

- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. 2002. Edisi Ketiga. Jakarta: MEP
- Mulyadi. 2009. *Auditing*. Buku Satu. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat
- Priyatno, Dwi, 2008. *Mandiri belajar SPSS*. Yogyakarta : Mediakom
- Santoso, Singgih. 2000. *SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Gramedia
- Soekrisno Agus (2004). *Auditing: pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik*, FEUI, Jakarta.
- SAP. 2001. *Standar Audit Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Widjaya Tunggal, Amin, 2004.,” *Management Audit,suatu pengantar*”, penerbitY Rineka Cipta.”